

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Strategi pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan ada 7 (tujuh) yaitu, pemberitahuan, pengiriman laporan, rekonsiliasi, pengentrian data, pembagian hasil entri data aset, cek data (*kroscek*) dan memasukkan laporan tahunan.

Dinas Pendidikan Kota Padang memiliki target dalam pengelolaan aset. Pertama, pengadaan Aplikasi SIPKD Modul Aset. Dimana, SIPKD merupakan singkatan dari Sistem Informasi Keuangan Daerah. Kedua, sinkronisasi Aplikasi E-Rekon berbasis internet yang dimiliki oleh Biro AP2BMD dan ketiga, target pekerjaan selama pandemi per-semester.

Kendala dalam menjalankan strategi pengelolaan aset ini, Dinas Pendidikan Kota Padang memiliki kendala dalam pelayanan publik seperti masih belum terlaksanannya *social distancing*, kendala proses kontrol dan banyaknya sekolah yang tidak melihat pengumuman secara online. Selain kendala, ada juga permasalahan pengelolaan aset, yaitu faktor psikologis dan rasa egoisme pejabat, dokumen anggaran tidak diketahui oleh pengelola barang, kendala psikologis dan ketidaktertiban penatausahaan barang.

#### 5.2 Saran

Dengan masih banyaknya kendala dalam menjalankan strategi pengelolaan aset ini, diharapkan Dinas Pendidikan lebih memperhatikan seperti pelayanannya. Karena, selama masa pandemi *Covid-19* pelayanan publik banyak dialihkan secara online. Sedangkan jika dilihat dari website Dinas Pendidikan Kota Padang, banyak informasi yang tidak bisa didapatkan. Hal ini sangat disayangkan karena jika hanya menggunakan aplikasi *WhatsApp*, maka hanya sekolah-sekolah saja yang bisa berhubungan langsung dengan Dinas Pendidikan. Sedangkan jika informasi pada *website* Dinas Pendidikan selalu diperbarui, masyarakat secara luas akan tahu perkembangan dunia pendidikan di kota padang terlebih lagi informasi-informasi yang dibutuhkan.

Berikut saran yang saya berikan untuk strategi pengelolaan aset:

1. Dinas pendidikan harus banyak memperbaharui informasi-informasi pada *website* terutama untuk pengelolaan aset secara terbuka.
2. Pelayanan publik harus terjadwal lagi, dikarenakan banyaknya kerumunan disaat masa pandemi *Covid-19* dengan jadwal yang telah dibuat tidak dijalankan.
3. Untuk pelaporan aset masih sangat banyak kesalahan. Sebaiknya adakan kembali monitoring atau BIMTEK dan Dinas Pendidikan memberikan sanksi terhadap sekolah yang tidak mengikuti BIMTEK atau monitoring yang telah dijadwalkan.